

**ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN DANA KEISTIMEWAAN DALAM
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

BISMAR HARRIS SATRIAWAN

20140520109

**PROGAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN DANA KEISTIMEWAAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2017

Oleh :

Bismar Harris Satriawan

20140520109

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Pengaji

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

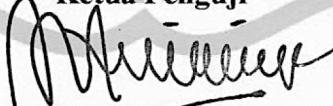
Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Desember 2017

Pukul : 11.00-12.00 WIB

Tempat : R. Ujian IP

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua Pengaji



Dr. Dyah Mutiarin, M.Si.

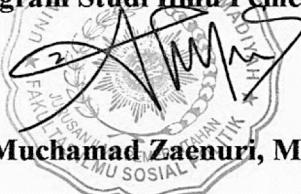
Pengaji II



Isnaini Muallidin, S.I.P., MPA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

HALAMAN PERNYATAAN

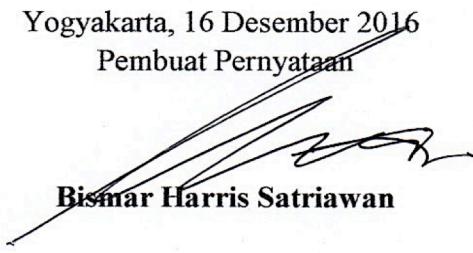
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bismar Harris Satriawan
NIM : 20140520109
Program Studi : S1 Ilmu Pemerintahan
Judul : Analisis Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah merupakan hasil karya ilmiah sendiri yang disusun oleh penulis dan bukan sama sekali dari hasil karya orang lain. Adapun karya atau pendapat orang lain yang sengaja di kutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi, adapun apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti di dalam penulisan skripsi ini mengandung “Plagiarisme” maka saya bersedia menerima segala bentuk konsekuensi yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2016
Pembuat Pernyataan


Bismar Harris Satriawan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ilmiah ini saya persembahkan teruntuk :

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai, yang InsyaAllah akan senantiasa melahirkan Pengabdi Negara yang Beriman, Berjiwa Patriot dan Kesatria....

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang InsyaAllah dengan segenap tumpah daya dan upayanya, akan senantiasa menjadi pilar terdepan dalam menjamin perlindungan dan kepentingan masyarakatnya, dengan memaksimalkan fungsi primer (pelayanan, pengaturan), dan juga fungsi sekundernya (pembangunan, pemberdayaan)....

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terkhususkan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, yang InsyaAllah akan senantiasa melahirkan pengabdi-pengabdi agama dan negara yang muda mendunia, unggul dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang memiliki kompetensi teoritik dan teknis di bidang pemerintahan berstandar global, yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat di level nasional dan internasional pada 2021.

Serta secara komprehensip teruntuk teman-teman akademisi muda mendunia, para stakeholders pemerintahan dan masyarakat yang berkepentingan. Besar harapan penulis agar kiranya karya ilmiah ini mempunyai daya manfaat data dan berdaya guna bagi bahan pertimbangan perbaikan kedepan harinya.

MOTTO

“Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya, Dan Dia Maha Perkasa Maha Pengampun”. (QS. Al-Mulk : 1-2)

“....Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujaadilah : 11)

“....Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan itu ada yang lebih Maha Mengetahui”. (QS. Yusuf : 76)

“Kamu tidak bisa menjadi seorang yang beriman dan seorang yang tidak beriman dalam waktu yang bersamaan, seorang sekuler tidak boleh mengaku dirinya seorang muslim, bagi seorang muslim ALLAH Subhanahu Wa Ta’ala adalah yang Maha Tinggi dan Maha Berkuasa” “Mesjid adalah barak kami. Kubah adalah topi baja kami, Menara mesjid adalah bayonet kami. Orang-orang yang beriman adalah tentara kami”. (Recep Tayyip Erdogan - President Of Turkey)

“Muslim yang tidak pedulikan urusan politik, akan dipimpin oleh politikus yang tidak pedulikan urusan orang muslim”. (Necmettin Erbakan - Prime Minister Of Turkey 1996-1997)

UCAPAN TERIMAKASIH

“Alhamdulillahilazi lahu ma fis samawati wama fil ardi, wa lahul hamdu fil akhirah, wa huwal hakimul khabir.” “Allahuma shali ala Muhammad wa ala ali Muhammad, khamasalaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kamabarakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Fil alamina innaka hamidun majid.”

Rasa terimakasih kami yang mendalam tak pernah lepas kami ucapkan atas segala bentuk doa, ilmu yang bermanfaat, bimbingan, arahan, dan segala bentuk dukungan serta motivasi yang diberikan, yaitu kepada :

- 1) Abah dan Mamah atas segala bentuk doa, kasih sayang, ilmu yang bermanfaat, bimbingan, arahan, motivasi, dukungan, dan segala bentuk perjuangan, pengorbanan, lelah dan letihnya yang sama sekali tidak akan pernah ternilai, terganti dengan segala sesuatu apapun, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* membala setiap keringat yang terkucur lembut di kulit manis Abah dan Mamah dengan balasan pahala yang terbaik di sisi-Nya dan ridho-Nya di dunia dan akhirat, serta menghadiahkan surga yang terbaik untuk Abah dan Mamah.
- 2) Kakak serta Adik kami yang tercinta. Terimakasih atas segala bentuk doa, ilmu yang bermanfaat, bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungannya.
- 3) Keluarga besar yang kami cintai di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Palangkaraya, Kuala Kapuas, Muara Teweh, yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu. Terimakasih atas segala bentuk doa, ilmu yang bermanfaat, bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungannya.

- 4) Dosen-dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY yang sangat kami cintai, sangat kami hormati, dan sangat kami banggakan, Prof. Dr. H. Achmad Nurmandi, M.Sc., Dr. Dyah Mutiarin M.Si., Dr. Titin Purwaningsih, S.IP, M.Si., Dr. Suranto, M.Pol., S.IP, M.Si, M.Si., Eko Priyo Purnomo, S.IP, M.Si, M.Res., Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., Dra. Hj. Atik Septi Winarsih, Bambang Eka Cahya W, S.IP, M.Si., Dr. Ulung Pribadi, M.Si., Dr. H. Muchamad Zaenuri, M.Si., Dr. Zuly Qodir, Drs. Juhari Sasmito Aji, M.S, Dr. (Cand.) Isnaini Muallidin, MPA, Awang Darumurti, S.IP, M.Si, Bahtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.,MPA, David Efendi, S.IP, MA, Dr. (Cand.) Tunjung Sulaksono, S.IP, M.Si., Erni Zuhriyati, SS, S.IP, Drs. Suswanta, M.Si., Dr. Inu Kencana Syafi'I, Hj. Rahmawati Husein, SS, MCP., Dr. (Cand.) Ane Permatasari, S.IP, MA., Dr. (Cand.) Dian Eka Rahmawati, S.IP, M.Si., serta dosen-dosen muda Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY yang sangat kami banggakan, sangat kami cintai dan sangat kami hormati, Sakir S.IP, M.IP., M. Eko Atmojo S.IP, M.IP., Asmarawati Handoyo, S.IP, M.A., Rijal Ramdani, S.IP, M.PA, Dewi Sekar Kencono, S.IP, M.Si, Terimakasih atas segala bentuk doa, ilmu yang bermanfaat, bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungannya
- 5) Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam X (sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY), Ir. Gatot Saptadi (Sekretaris Daerah DIY), Arif Noor Hartanto, S.IP. (Wakil Ketua DPRD DIY), Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec

(Asisten Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY), Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., SU. (Ketua Parampara Praja DIY), Drs.Tavip Agus Rayanto, M.Si., (Ketua Bappeda DIY), Drs. H. Umar Priyono, M.Pd. (Kepala Dinas Kebudayaan DIY), Drs. Bambang Wisnu Handoyo, MM. (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah/DPPKAD DIY), Ir. Hananto Hadi Purnomo, M.Si (Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang), Agustina Pangestujati S.IP (Kepala Sub Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY), Noviar Rahmad, M.Si (Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY), Taurina Nugrahanu, S.Komp., M.Kom. (Kepala Sub Bagian Pengendalian Keistimewaan Bappeda DIY), Ir. Agung Satrio (Kepala Sub Bagian Program dan Informasi (Dinas PUP dan ESDM DIY), Aris E.N. (Kepala Bidang Anggaran Belanja, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah/DPPKAD DIY).

- 6) Seluruh staf dan karyawan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, Ibu Ning, Pak Wisnu, Mas Wahid, Mas Iqbal, Mba Dilla. Terimakasih atas segala bentuk doa, ilmu yang bermanfaat, bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungannya.
- 7) Teman-teman Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, yang selama ini telah bersama-sama di dalam bingkai persahabatan yang Unggul, Islami, Muda & Mendunia, pengabdi-pengabdi agama dan negara, unggul dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang memiliki kompetensi teoritik dan teknis di bidang pemerintahan berstandar global, yang berlandaskan nilai- nilai Islam. Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang dan kebersamaan, doa, ilmu yang bermanfaat, motivasi, serta dukungannya.

KATA PENGANTAR

Assallamu'allaikum Warohmatullahi Wabarakatuh....

“Alhamdulillahilazi lahu ma fis samawati wama fil ardi, wa lahul hamdu fil akhirah, wa huwal hakimul khabir.” Segala puja dan puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang memiliki serta menguasai segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya, dan segala puja dan puji di akhirat bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Dialah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Rabb Yang Maha Bijaksana Maha Teliti”. Shalawat dan salam penghormatan senantiasa tercurah kepada kekasih Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, manusia yang terbaik yang pernah dilahirkan ke muka bumi, manusia Rahmatan Lil'alamin, yaitu Rasulullah Muhammad *Shallallahu`alaihi Wa Sallam*. Menjadi benar bagi kita sebagai seorang hamba dan umat yang beriman dalam memulai segala disiplin kehidupan kita, dimulai dengan memuji Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mencurahkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu`alaihi Wa Sallam*.

Skripsi ini disusun dengan judul “*Analisis Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017*” disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana. Penulis dengan sangat terbuka dan secara rendah hati menerima kritik dan saran guna untuk perbaikan serta pertimbangan penulisan ke depannya.

Rasa terimakasih kami yang mendalam tak pernah lepas kami ucapkan atas segala bentuk doa, ilmu yang bermanfaat, bimbingan, arahan, dan segala bentuk dukungan serta motivasi yang diberikan, yang pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada :

- 1) Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2) Dr. Titin Purwaningsih, S.IP, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3) Dr. H. Muchamad Zaenuri, M.Si., selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 4) Dr. Dyah Mutiarin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih banyak atas ilmu yang bermanfaat, segala bentuk dukungan dan bimbingannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 5) Dr. Suranto, M.Pol., selaku Dosen Penguji 1, terimakasih atas kritik, saran, serta bimbingannya untuk perbaikan skripsi ini.
- 6) Isnaini Muallidin, S.IP., MPA, selaku Dosen Penguji 2, terimakasih atas kritik, saran, serta bimbingannya untuk perbaikan skripsi ini.
- 7) Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terimakasih yang mendalam kami ucapkan atas segala bentuk ilmu yang bermanfaat yang di berikan,

dukungan, bantuan, serta kerjasamanya selama penulis menempuh studi di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- 8) Seluruh pihak yang mana penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terimakasih yang mendalam penulis ucapkan atas segala bentuk doa dan dukungannya.

Besar harap penulis, dengan senantiasa mengharapkan ampunan dan ridho Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, skripsi ini dapat memiliki nilai manfaat dan daya guna untuk berbagai pihak yang memerlukan. “*Rabbanaa aatinaa fii alddunyaaa hasanatan wafii al-aakhirati hasanatan waqinaa 'adzaaba alnnaari*”. “*Subhaana rabbika rabbi al'izzati 'ammaa yashifuuna, wasalaamun 'alaa almursaliina, waalhamdu lillaahi rabbi al'aalamiina*”. *Wassalamu'allaikum Warohmatullahi Wabarakatuh....*

ABSTRAK

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Salah satu bentuk pengakuan negara atas kewenangan keistimewaan yang dimiliki DIY adalah adanya alokasi dana keistimewaan sesuai dengan prinsip "money follow function". Dana Keistimewaan DIY dialokasikan pemerintah pusat untuk mendanai 5 (lima) kewenangan urusan keistimewaan DIY, sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 7, yakni antara lain : (i) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (ii) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (iii) Kebudayaan, (iv) Pertanahan, (v) Tata Ruang. Adapun salah satu tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 5 huruf b, salah satunya adalah bertujuan untuk "mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat". Namun 5 (lima) tahun berjalananya pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY dari tahun 2013-2017, belum dirasakan sebagai suatu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat DIY, sebagaimana jika melihat masih tingginya angka kemiskinan pada pada Maret 2017 sekitar 488,53 ribu jiwa atau sekitar 13.02%. Angka ini masih cukup tinggi apabila dibanding dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 10.96%. Kondisi ini berimbang pada kesenjangan antara warga kaya dan warga miskin, dimana Indeks Ratio Gini DIY sebesar 0.425% atau menjadi yang tertinggi se-Indonesia. Menjadi dilematis ketika mengetahui dilain sisinya alokasi dana keistimewaan DIY terus meningkat di setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sejauhmana kebijakan anggaran dana keistimewaan dan apa saja faktor penghambat kebijakan anggaran dana keistimewaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat DI Yogyakarta tahun 2013-2017. Jenis penilitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-dept interview*), wawancara elit (*elite interview*), serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anggaran dana keistimewaan DIY tahun 2013-2017 belum maksimal. Urusan Kebudayaan dan Tata Ruang sebagai urusan yang dominan mendapatkan alokasi dana keistimewaan dan juga paling banyak memiliki program kegiatan, dan urusan yang paling potensial memberi kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, hingga saat ini program kegiatan yang sudah berhasil direalisasikan belum dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY yang sejatinya sebagai penerima manfaat dana keistimewaan. Adapun faktor penghambat kebijakan anggaran dana keistimewaan dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat DIY, antara lain: Target Angka Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Relatif Kecil, Keterlambatan Regulasi, Keterlambatan Distribusi Dana Dari Pusat, Pemahaman Birokrat, Gap Informasi Dan Tidak Ada Keterlibatan Masyarakat Desa dan Pedukuhan. *Kata Kunci: Kebijakan Anggaran, Dana Keistimewaan, Kesejahteraan Masyarakat, Daerah Istimewa Yogyakarta.*

ABSTRAC

The State acknowledges and respects local government units of a special or special nature regulated by constitution. One form of state recognition of the privileges possessed by the special region of Yogyakarta is the allocation of privileged funds in accordance with the principle of "money follow function". Privileged Funds The special region of Yogyakarta is allocated by the central government to fund 5 (five) special privileges of Yogyakarta, as defined in UUK No. 13 years 2012 clause 7, (i) that is the positions, seat, job and authorities governor and vice governor, (ii) institutional affairs, (iii) culture affairs, (iv) land affairs, (v) spatial affairs. One of the objectives of the regulation of authority in special affairs as described in UUK No. 13 years 2012 clause 5 point b, one of which is aiming for "realize the welfare and tranquility of the society". But 5 (five) years running the implementation of the privileges of DIY from the year 2013-2017, has not been perceived as an increase in prosperity for the people of DIY, as if seeing the high rate of poverty in March 2017 around 488.53 thousand people or about 13.02%. This figure is still quite high when compared with the percentage of the national poor population of 10.96%. This condition affects the gap between the rich and the poor, where the Gini Ratio of DIY is 0.425% or the highest in Indonesia. Being a dilemma when knowing on the other hand the allocation of DIY privilege funds continue to increase in each year. This study aims to determine and explain the extent of the privileges of budget policy and any factors that hinder the right of budget policy in realizing the welfare of the people of DIY in 2013-2017. The type of research used is qualitative approach. Methods of data collection using in-dept interview techniques, elite interviews, and documentation. The result of the research shows that the implementation of budget policy of Privilege of DIY in 2013-2017 is not yet maximal. Culture and Spatial affairs as the most dominant affairs get the allocation of privileged funds and also most have programs and activities, and also as the most potential business to contribute greatly to improving the welfare of the people of DIY, until now the programs and activities that have been successfully realized can not be perceived as improving the welfare of the people of DIY which is actually a beneficiary of privilege funds. The inhibiting factors of budget policy of privilege in realizing the Welfare of the DIY Community are: Targeting of Poverty Reduction Rate and Relative Small Inequality, Regulatory Delay, Delay Distribution of Privileged Funds From Central, Understanding Bureaucrats, Information Gap and No Involvement from Villagers and hamlet.

Keywords: Budget Policy, Privileged Fund, Welfare Society, Special Region of Yogyakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11

1.5 Tinjauan Pustaka.....	12
1.6 Kerangka Teori.....	16
1.6.1 Desentralisasi Asimetris.....	16
1.6.2 Kebijakan Anggaran.....	17
1.6.3 Dana Keistimewaan.....	25
1.6.4 Kesejahteraan Masyarakat.....	45
1.7 Kerangka Pikir Penelitian.....	48
1.8 Definisi Konsepsional.....	49
1.9 Definisi Operasional.....	50
1.10 Metode Penelitian.....	51
1.10.1 Jenis Penelitian.....	51
1.10.2 Lokasi Penelitian.....	52
1.10.3 Jenis Data.....	53
1.10.4 Teknik Pengumpulan Data.....	55
1.10.5 Unit Analisa Data.....	57
1.10.6 Teknik Pengambilan Objek Penelitian.....	58
1.10.7 Teknik Analisa Data.....	58

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2.1 Profil Daerah Istimewa Yogyakarta.....	63
2.1.1 Sejarah.....	63
2.1.2 Dasar Filosofi Pembangunan.....	64

2.1.3 Visi.....	64
2.1.4 Misi.....	64
2.1.5 Tujuan.....	65
2.2 Karakteristik Wilayah.....	66
2.3 Karakteristik Penduduk.....	66
2.4 Karakteristik Pendidikan.....	67
2.5 Karakteristik Perekonomian.....	69
2.6 Karakteristik Kemiskinan dan Ketimpangan DIY.....	71

BAB III KEBIJAKAN ANGGARAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2017

3.1 Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017.....	76
3.1.1 Prioritas Dana Keistimewaan.....	77
3.1.1.1 Alokasi Dana Keistimewaan.....	77
3.1.1.2 Penempatan Dana Keistimewaan.....	89
3.1.1.3 Tujuan Dana Keistimewaan.....	119
3.1.1.4 Target Dana Keistimewaan.....	124
3.1.2 Kualitas Dana Keistimewaan.....	134
3.1.2.1 Penyerapan Dana Keistimewaan.....	134
3.1.2.2 Output Dana Keistimewaan.....	148
3.1.2.3 Outcome Dana Keistimewaan.....	156

3.1.3 Pemangku Kepentingan Dana Keistimewaan.....	162
3.1.4 Faktor Penghambat Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.....	166
3.1.4.1 Target Angka Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Relatif Kecil.....	167
3.1.4.2 Keterlambatan Regulasi.....	170
3.1.4.3 Keterlambatan Distribusi Dana Keistimewaan Dari Pusat.....	172
3.1.4.4 Pemahaman Birokrat.....	175
3.1.4.5 Gap Informasi Dan Tidak Ada Keterlibatan Masyarakat Desa dan Pedukuhan.....	178
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	185
4.2 Rekomendasi.....	193
DAFTAR PUSTAKA.....	197
LAMPIRAN.....	201

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Kebijakan Anggaran dan Efektivitas Dana Keistimewaan.....	14
Tabel 1.2 Tahapan Penyaluran Dana Keistimewaan.....	28
Tabel 1.3 Perdais DIY Tahun 2013-2015.....	33
Tabel 1.4 Batasan Kerangka Logis Urusan Keistimewaan.....	34
Tabel 1.5 Lokasi Penelitian.....	52
Tabel 1.6 Data Primer Penelitian.....	53
Tabel 1.7 Data Sekunder Penelitian.....	54
Tabel 1.8 Objek Penelitian (Key Informan).....	56
Tabel 1.9 Unit Analisis Data.....	57
Tabel 2.1 Angka Melek Huruf DIY dan Nasional menurut Kelompok Usia, 2010-2016 (Persen).....	68
Tabel 2.2 Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB DIY Tahun 2012-2016 (%).....	70
Tabel 2.3 Perkembangan Indikator Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2015.....	73
Tabel 3.1 Penempatan Dana Keistimewaan DIY 2013-2017.....	90
Tabel 3.2 Penempatan Danais Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wagub Tahun 2013-2017.....	94

Tabel 3.3 Penempatan Danais Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY	
Tahun 2013-2017.....	99
Tabel 3.4 Penempatan Danais Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017.....	106
Tabel 3.5 Penempatan Danais Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017.....	113
Tabel 3.6 Penempatan Danais Urusan Tata Ruang Tahun 2013-2017.....	117
Tabel 3.7 Korelasi Visi, Misi, Target/Tujuan, Sasaran Urusan Kelembagaan.....	127
Tabel 3.8 Korelasi Visi, Misi, Target/Tujuan, Sasaran Urusan Kebudayaan.....	129
Tabel 3.9 Korelasi Visi, Misi, Target/Tujuan, Sasaran Urusan Tata Ruang.....	133
Tabel 3.10 Progres Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2013-2017.....	134
Tabel 3.11 Progres Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY Tahun Anggaran 2013-2017.....	137
Tabel 3.12 Progres Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013-2017.....	139
Tabel 3.13 Progres Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2013-2017.....	142
Tabel 3.14 Progres Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2013-2017.....	145
Tabel 3.15 Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama RPJMD 2013-2017.....	159

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta September 2011-Maret 2017 (dalam ribuan orang).....	4
Grafik 1.2 Indeks Ratio Gini (%).....	5
Grafik 1.3 Perbandingan Jumlah Alokasi Danais (Miliar Rupiah) dengan Angka Kemiskinan (Ribu Jiwa) dan Indeks Ratio Gini (%) Tahun 2013-2017.....	9
Grafik 2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Sekolah di DIY, 2003-2016 (Persen).....	67
Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2012-2016 (%).....	69
Grafik 2.3 Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Wilayah di DIY, 2002-2017 (000 Rp).....	71
Grafik 2.4 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan DIY, 2007-2017.....	72
Grafik 2.5 Perkembangan Indeks Gini menurut Wilayah di DIY, 2007- 2017.....	74
Grafik 3.1 Jumlah Alokasi Danais (Miliar Rupiah) Tahun 2013-2017.....	79
Grafik 3.2 Peningkatan Alokasi Danais (%) Tahun 2013-2017.....	80
Grafik 3.3 Alokasi Danais Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013-2017.....	82
Grafik 3.4 Alokasi Danais Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY Tahun 2013-2017.....	83

Grafik 3.5 Alokasi Danais Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017.....	85
Grafik 3.6 Alokasi Danais Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017.....	86
Grafik 3.7 Alokasi Danais Urusan Tata Ruang Tahun 2013-2017.....	88
Grafik 3.8 Program dan Kegiatan Urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013-2017.....	93
Grafik 3.9 Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY Tahun 2013-2017.....	96
Grafik 3.10 Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017.....	101
Grafik 3.11 Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta September 2011 - Maret 2017 (dalam ribuan orang).....	107
Grafik 3.12 Indeks Ratio Gini (%).....	108
Grafik 3.13 Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017.....	110
Grafik 3.14 Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang Tahun 2013-2017.....	114
Grafik 3.15 Realisasi Keuangan dan Fisik (%) Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2013-2017.....	135
Grafik 3.16 Realisasi Keuangan dan Fisik (%) Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY Tahun Anggaran 2013-2017.....	138
Grafik 3.17 Realisasi Keuangan dan Fisik (%) Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013-2017.....	140

Grafik 3.18 Realisasi Keuangan dan Fisik (%) Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2013-2017.....	143
Grafik 3.19 Realisasi Keuangan dan Fisik (%) Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2013-2017.....	146
Grafik 3.20 Realisasi Serapan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (%).....	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mekanisme Pendanaan Keistimewaan DIY.....	27
Gambar 1.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	48
Gambar 1.3 Metode Analisis Data Interaktif.....	59
Gambar 2.1 Perkembangan Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson) DIY, 2010-2016 (Persen).....	74

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
AMH	: Angka Melek Huruf
BPS	: Badan Statistik Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DANAIS	: Dana Istimewa
DK	: Dana Keistimewaan
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPKA	: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
HB	: Hamengku Buwono
HC	: Head Count
HCI	: Head Count Index
IKM	: Inovasi Kreatifitas Masyarakat

KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
LAPK	: Laporan Akhir Pencapaian Kinerja
LPK	: Laporan Pencapaian Kinerja
LARPDK	: Laporan Akhir Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan
LKPJ	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LKPJ AMJ	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan
MENKEU	: Menteri Keuangan
MENDAGRI	: Menteri Dalam Negeri
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PERDAIS	: Peraturan Daerah Istimewa
PERMENKEU	: Peraturan Menteri Keuangan
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PPADK	: Pembantu Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan
PA	: Pengguna Anggaran
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PEMKOT	: Pemerintah Kota
PEMKAB	: Pemerintah Kabupaten
PEMDES	: Pemerintah Desa
PUP ESDM	: Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
PAG	: Pakualaman Ground
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto

RI	: Republik Indonesia
RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPPDK	: Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan
SPTJM	: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
SETDA	: Sekretariat Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Pelaksanaan
SG	: Sultan Ground
UUD	: Undang Undang Dasar
UUK	: Undang Undang Keistimewaan
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah